

Judul : Harus diperkuat lagi budaya belajar & kompetisi di kelas
Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Harus Diperkuat Lagi Budaya Belajar & Kompetisi Di Kelas

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu'ti membuka peluang pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas bagi siswa mulai tahun ajaran 2027. Wacana ini mencuat setelah adanya rekomendasi Dewan Pendidikan terkait evaluasi capaian belajar siswa.

Dikutip dari kanal YouTube Universitas Pendidikan Ganesha pada Kamis, 8 Oktober 2026, Abdul Mu'ti menyatakan bahwa Pemerintah siap menerapkan rekomendasi tersebut, apabila mendapat dukungan dari para ahli dan menjadi bagian dari hasil konvensi.

"Mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya, tidak semua murid otomatis naik kelas," ujar Abdul Mu'ti. Menurutnya, kebijakan tersebut

bertujuan mendorong siswa agar lebih serius dalam belajar. Ia menyoroti pola pikir sebagian siswa yang menganggap bahwa rajin maupun malas belajar akan tetap berujung pada kenaikan kelas.

Abdul Mu'ti menyebut fenomena tersebut sebagai pola RMS (Rajin, Malas, Sama). Karena itu, ia menilai budaya belajar dan kompetisi perlu diperkuat kembali di lingkungan pendidikan. Siswa juga perlu dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, rajin belajar, dan siap menghadapi persaingan. Dalam hal ini, evaluasi capaian pembelajaran dinilai penting untuk menentukan perkembangan dan kelanjutan pendidikan siswa.

Meski demikian, wacana tersebut belum menjadi kebijakan final. Penerapannya masih bergantung

pada rekomendasi Dewan Pendidikan, dukungan para ahli, serta penyusunan mekanisme pelaksanaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menanggapi wacana tersebut, Komisi X DPR RI meminta Kemendikdasmen mengkaji rencana pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas secara matang. Kebijakan ini memungkinkan siswa yang belum mencapai standar kompetensi untuk mengulang pembelajaran di tingkat kelas yang sama.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, penilaian kenaikan kelas tidak boleh hanya bergantung pada hasil akademik akhir. Menurutnya, proses belajar siswa, kesiapan sekolah, serta kapasitas guru dalam memberikan pendampingan

juga perlu menjadi pertimbangan. Rencana tersebut dilatarbelakangi evaluasi Pemerintah terhadap mutu pendidikan nasional, termasuk capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA), khususnya pada aspek literasi

dan numerasi yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Meski demikian, Komisi X DPR RI meminta agar kebijakan ini dikaji secara mendalam, sehingga tidak menimbulkan beban psikologis maupun akademik bagi peserta didik.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih juga mendorong agar wacana tersebut didiskusikan lebih lanjut. Menurutnya, evaluasi pendidikan perlu diperkuat agar kebijakan kenaikan kelas memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Sementara itu, Koordinator

Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti potensi ketidakadilan dalam penerapan kebijakan tersebut.

Ia menilai ketidakmampuan siswa dalam mencapai standar pembelajaran tidak bisa semata-mata dibebankan kepada anak. Kualitas sistem pendidikan, kompetensi guru, dan metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah juga perlu menjadi bahan evaluasi.

"Saya mencium adanya aroma ketidakadilan," ujar Ubaid. Lantas, bagaimana pandangan Ubaid Matraji dan Abdul Fikri Faqih mengenai wacana pemberlakuan kembali kebijakan agar siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027? Berikut petikan wawancara selengkapnya.

ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR RI

Perlu Didiskusikan Oleh Semua Pihak



“Saya kira pernyataan menteri mengenai kemungkinan pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas harus menjadi bahan renungan dan diskusi ulang bagi semua pihak.

Bagaimana pandangan Anda mengenai wacana Kemendikdasmen yang akan memberlakukan kebijakan agar siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027?

Sebetulnya, dalam pendidikan memang ada fase evaluasi untuk menentukan apakah siswa naik kelas atau tidak. Namun, pendekatan evaluasi yang digunakan bisa berbeda-beda. Kalau kita berkhilaf pada negara-negara Skandinavia, misalnya, evaluasi tidak terlalu bertumpu pada tes. Ada pemantauan terhadap perkembangan siswa, tidak banyak pekerjaan rumah (PR), dan tidak banyak tes. Bahkan, dalam praktikkan tertentu, salah satu kelas atau tidak naik kelas tidak terlalu diperhatikan. Sementara itu, kita masih mengutip sistem tes dan memiliki standar penilaian tertentu. Jika hasil evaluasi siswa musnah di bawah standar, seharusnya ada pertimbangan dari dewan guru untuk menentukan apakah siswa tersebut layak naik kelas atau perlu mengulang.

Memangnya, sejak kapan kebijakan yang mengharuskan semua siswa lulus itu diterapkan?

Saya tidak tahu sejak kapan perubahan

itu terjadi. Sekarang, sekolah-elah semua siswa harus lulus dan naik kelas sehingga evaluasi menjadi kurang efektif.

Kalau Anda melihat wacana Kemendikdasmen tersebut, apa pesan yang ingin disampaikan oleh menteri?

Kalau Pak Menteri ingin memberlakukan kembali kebijakan tidak naik kelas, saya kira yang perlu dilakukan adalah mengembalikan fungsi evaluasi secara tepat. Penerapannya perlu didiskusikan lebih lanjut. Sebab, apa gunanya tes jika hasilnya tidak menentukan apa apa.

Saya kira pernyataan menteri mengenai kemungkinan memberlakukan kembali kebijakan tidak naik kelas harus menjadi bahan renungan dan diskusi ulang bagi semua pihak.

Apa yang ingin Anda tekankan dalam persoalan ini?

Saya menekankan wacana ini sebagai pengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal proses belajar-mengajar, melainkan juga soal evaluasi yang harus mendapat perhatian serius. Sebagai contoh, hasil Ujian Nasional tidak lagi menentukan kelulusan

siswa. Begitu pula dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang perlu memiliki fungsi dan tindak lanjut yang jelas, misalnya untuk menentukan apakah suatu sekolah membutuhkan intervensi atau tidak. Kalau fungsi evaluasi tidak jelas, pada akhirnya hasil pendidikan bisa kembali bergantung pada faktor lain. Misalnya, siswa yang mengikuti bimbingan belajar mungkin memperoleh hasil lebih baik, tetapi hasil tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan proses pembelajaran yang berlangsung secara alami di sekolah. Karena itu, evaluasi harus memiliki tujuan dan konsekuensi yang jelas, termasuk dalam menentukan kelulusan maupun kenaikan kelas.

Apakah evaluasi pendidikan perlu diperbaiki?

Menurut saya, wacana ini merupakan sinyal bagi seluruh pelaku pendidikan untuk mengevaluasi kembali sistem yang ada. Kita perlu mengkaji apakah model tes masih perlu dipertahankan, apakah perlu ada ketentuan naik kelas dan tidak naik kelas, atau apakah kita harus menggunakan pendekatan lain. ■ REN

UBAID MATRAJI, Koordinator Nasional JPPI

Perlu Ditinjau Ulang, Karena Mencederai Keadilan Siswa



“Saya khawatir sekolah justru berubah menjadi tempat untuk memberikan label atau menghukum anak atas ketidakmampuan mereka, tanpa melihat persoalan mendasar.

Bagaimana pendapat Anda jika kebijakan agar siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027 diberlakukan kembali?

Kami menaruh perhatian pada persoalan hak anak atas pendidikan. Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

Pertanyaan saya, kalau ada anak kelas 1 SD yang belum bisa membaca, siapa yang harus disalahkan? Jika sistem tidak naik kelas diberlakukan, anak tersebut tidak bisa naik ke kelas 2 karena belum bisa membaca.

Pertanyaan kritisnya, mengapa anak kelas 1 SD itu belum bisa membaca? Apakah karena anaknya dianggap bodoh atau karena metode dan sistem pembelajarannya yang buruk? Ini harus jelas terlebih dahulu.

Lalu, apa yang menurut Anda bermasalah?

Saya khawatir karena selama ini sistem pembelajaran kita masih buruk. Hal itu juga tercermin dalam berbagai data. Kurikulum kita masih bermasalah, begitu pula kompetensi guru. Kalau sistem pembelajarannya

buruk, kurikulumnya bermasalah, buku-bukunya tidak memadai, dan kompetensi gurunya rendah, mengapa justru siswanya yang dihukum.

Anda melihat ada ketidakadilan dalam kebijakan tersebut?

Saya mencium adanya aroma ketidakadilan.

Mengapa yang bermasalah adalah sistem pendidikannya, tetapi yang menjadi korban justru siswa?

Siswa dihukum, diberi label. Lalu dinyatakan tidak bisa naik kelas. Padahal, ketidakmampuan mereka bisa saja disebabkan oleh guru yang tidak kompeten, kurikulum yang buruk, atau sistem pembelajaran yang tidak berjalan dengan baik.

Mengapa semua kelemahan itu justru ditimpakan kepada siswa? Mereka diberikan sanksi dan dinyatakan tidak naik kelas karena tidak bisa membaca.

Menurut Anda, apakah kebijakan ini perlu ditinjau ulang?

Menurut saya, kebijakan ini perlu dipikirkan ulang, karena berpotensi mencederai keadilan bagi anak-anak

yang menggunakan sekolah sebagai tempat untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka.

Mayoritas anak Indonesia menggunakan sistem pendidikan di sekolah untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan diri. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk mendampingi anak belajar di rumah. Karena itu, sekolah menjadi tumpuan utama bagi banyak keluarga.

Apa harapan Anda?

Harapan kita, anak-anak mendapatkan sistem pendidikan yang baik, bertumpu dengan guru yang kompeten, serta belajar dalam ekosistem pendidikan yang mendukung dan berintegritas.

Namun, jika kebijakan tidak naik kelas diterapkan tanpa terlebih dahulu memperbaiki ekosistem pendidikan di sekolah, harapan tersebut justru akan bergeser ke lembaga pendidikan di luar sekolah.

Apa yang Anda khawatirkan?

Saya khawatir sekolah justru berubah menjadi tempat untuk memberikan label atau menghukum anak atas ketidakmampuan mereka, tanpa melihat persoalan mendasar yang menyebabkan ketidakmampuan tersebut. ■ REN